

SKRIPSI

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2015-2019

AIDA SALSABILA RODIAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2015-2019

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AIDA SALSABILA RODIAH
A31116023**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2015-2018

disusun dan diajukan oleh

AIDA SALSABILA RODIAH
A31116023

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Hj Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650320 1992032001

Pembimbing II



Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA
NIP 19581110 198710 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 1992032003

SKRIPSI

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2015-2019

disusun dan diajukan oleh

AIDA SALSABILA RODIAH
A31116023

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Hj Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M. Soc.Sc, CA	Anggota	3. 
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP 
NIP 19660405 1992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Aida Salsabila Rodiah

NIM : A31116023

departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2015-2019

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Aida Salsabila R.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kondisi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019”. Demikian pula salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah membawa Islam sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar. Proses penyusunan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muh. Nur Amin dan Ibunda St. Ramlah yang selalu sabar dalam mendidik, membimbing dan membina serta selalu mendoakan penulis. Hanya doa dan balasan bakti yang bisa anakmu berikan, semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua.
2. Saudara-saudaraku, St. Fatima, Zulfan Ali Husnan, dan Ubaydillah Arzaqi beserta keluarga dari penulis yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendengar keluh kesahku, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
3. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Dr.

Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CA., yang telah memberikan bantuan dan dukungannya

5. Ibu Dr. Hj Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini, yang selalu memberikan bantuan dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M. Soc, Sc, CA., dan bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selaku penguji yang telah memberikan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengetahuannya selama proses perkuliahan terkhusus kepada Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademik.
8. Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pak Ical, Pak Bur, Pak Safar, Ibu Susi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
9. Kak Amiruddin, seseorang yang selalu ada untuk penulis, terima kasih untuk segala bantuan dan bimbingannya.
10. Sahabatku dikampus, Nur Ikhwana dan Nurul Fahimah yang selalu sabar menemani dan membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Serta keluarga besar famiglia Akuntansi 2016, fadhil, nanda, murdi, abje, budi,fiqrie, izzwan dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu.

11. Saudara seperjuangan FDMI, kak uci, kak luluk, kak fahmi, kak cici, kak dias, kak anti, terima kasih untuk nasihat dan motivasi kepada penulis, semoga kita selalu semangat dalam membela dan memperjuangkan QHJ.
12. Teman-teman KKN Kelurahan Lonrae, Alif, Nabila, Mike, Indra, Astri, Ocy, Rani, Salsya, Ical, Virda, Wiwik, dan Dandi. Terima Kasih atas canda dan tawanya yang masih berlangsung hingga sekarang.
13. Serta rekan-rekan lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 17 Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

Analisis Kondisi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019

Aida Salsabila
Nirwana
Christian Mangiwa

Penelitian ini berangkat dari fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia yaitu relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur APBD yang kemudian menjadikan pemerintah daerah kurang inovatif sehingga menimbulkan kesadaran yang rendah terhadap kondisi keuangannya. Informasi yang diperoleh dari ringkasan APBD kabupaten Enrekang, menggambarkan pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan dan terkecil berasal dari Pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019 sebagai gambaran kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari LHP LKPD kabupaten Enrekang untuk tahun anggaran 2015-2019 yang diperoleh dari situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil dari penelitian ini menunjukkan daerah Kabupaten Enrekang memiliki kondisi keuangan yang baik ditinjau dari dimensi jangka pendek, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas tingkat layanan. Dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Enrekang yang masih belum baik ditinjau dari dimensi kemandirian keuangan daerah karena rendahnya pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari luar atau bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Analysis of Local Financial Conditions in the Local Government of Enrekang Regency in the Year of 2015-2019

Aida Salsabila
Nirwana
Christian Mangiwa

This research is based on general phenomenon faced by most local governments in Indonesia, namely the relatively small contribution of Regional Original Income (PAD) in the APBD structure which then makes local governments less innovative, resulting in low awareness of their financial conditions. Information obtained from the summary of the Enrekang district budget, shows that the largest revenue comes from balancing funds and the smallest comes from local revenue. The purpose of this study is to determine the local financial condition of Enrekang Regency for the 2015-2019 fiscal year as an overview of the ability and success of local governments in managing their own local finances. The method used in this research is descriptive method with a quantitative approach. The data used is secondary data sourced from the LHP LKPD of Enrekang Regency for the 2015-2019 fiscal year which is obtained from the website of the Information and Documentation Management Officer (PPID). The results of this study shows that the Enrekang Regency has a good financial condition in terms of short-term dimensions, budget solvency, financial flexibility and service level solvency. And the local financial condition of Enrekang Regency which is still not good in terms of long-term solvency dimensions due to the sizeable growth of liabilities and regional financial independence due to low regional revenue so that local governments are still very dependent on external sources of funding or depend on transfer funds from the central government.

Keywords: Financial Condition, Financial Management, Local Government

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Keuangan Daerah	9
2.1.2 Laporan Keuangan Daerah	11
2.1.3 Kondisi Keuangan Daerah	15
2.1.4 Analisis Kondisi Keuangan Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian.....	30
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	31
3.3.1 Subjek Penelitian	31
3.3.2 Objek Penelitian.....	31

3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.6 Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	36
4.2 Gambaran Keuangan Kabupaten Enrekang	36
4.3 Hasil Analisis	38
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	59
5.3 Keterbatasan Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
1.1	Ringkasan APBD Kabupaten Enrekang TA 2015-2019	3
2.1	Penelitian Terdahulu	26
4.1	APBD Kabupaten Enrekang 2015-2019	37
4.2	Realisasi APBD Kabupaten Enrekang 2015-2019	37
4.3	Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.....	38
4.4	Pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.....	38
4.5	Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Tingkat Layanan Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.2 Kerangka pemikiran	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
4.1	Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	40
4.2	Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	44
4.3	Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	47
4.4	Hasil Perhitungan Dimensi Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	50
4.5	Hasil Perhitungan Dimensi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	54
4.6	Rasio A pada Dimensi Solvabilitas Tingkat Layanan	55
4.7	Rasio B pada Dimensi Solvabilitas Tingkat Layanan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019	65
2	Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang 205-2019	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah sebagai aktor utama akan melakukan pengeluaran yang diharap mampu mendorong pergerakan roda ekonomi secara langsung, baik di tingkat nasional dan lokal, melalui pengembangan infrastruktur atau fasilitas layanan publik. Peran pemerintah sebagai fasilitator akan lebih banyak ditunjukkan melalui kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan tercermin dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD) (Nirwana, 2014).

Diberlaluakannya prinsip otonomi daerah memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk melakukan pemerintahannya yang direncanakan dan tersusun dalam APBD. Prioritas kewenangan tersebut adalah melakukan kegiatan berbasis pelayanan publik untuk mendukung tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Menurut Kartiwa (2004), "Indikasi keberhasilan Otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah".

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat

dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur APBD. Idealnya, PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol atau kewenangan daerah. (Suryani, 2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ringkasan APBD kabupaten Enrekang, sepanjang Tahun Anggaran 2015-2019 pendapatan daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp802.601 Milyar lebih pada Tahun 2015, menjadi 1.064 Triliun lebih pada Tahun 2019. Di antara ketiga kelompok pendapatan, terlihat bahwa Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang paling tinggi, kemudian Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah, dan terakhir adalah Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan selama tahun 2015-2019 di Kabupaten Enrekang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Ringkasan APBD Kabupaten Enrekang TA 2015-2018

Akun	Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	802.671.242.451	1.116.233.981.292	976.840.113.246	1.041.081.765.805	1.095.919.240,263
PAD	47.211.238.451	91.793.908.000	102.781.017.420	86.576.398.820	109,257,212,972
Pajak daerah	6.130.000.000	8.134.000.000	8.155.000.000	12.745.000.000	12,005,000,000
Retribusi daerah	19.294.650.000	30.267.700.000	26.071.547.500	25.632.397.500	33,155,720,063
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.050.000.000	5.050.000.000	7.550.000.000	15.100.000.000	15,100,000,000
Lain-lain PAD yang sah	16.736.588.451	48.342.208.000	61.004.469.920	33.099.001.320	48,996,492,909
Dana Perimbangan	610.603.876.802	882.495.361.000	743.531.374.000	785.806.185.000	795,664,208,691
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.307.536.802	24.829.780.000	20.561.917.000	17.506.647.000	18,249,508,691
Dana alokasi umum	526.156.000.000	543.890.364.000	543.890.364.000	534.335.959.000	559,038,403,000
Dana alokasi khusus	59.140.340.000	313.775.217.000	179.079.093.000	233.963.579.000	218,376,297,000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	144.856.127.198	141.944.712.292	130.527.721.826	168.699.181.985	190,997,818,600
Hibah	369.230.000	1.566.880.000	6.336.630.000	34.000.000.000	36,100,000,000
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	24.118.974.678	25.561.311.692	29.928.158.226	33.056.166.385	36,237,000,000
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	109.529.000.000	103.327.631.000	89.128.443.000	97.508.525.000	115,526,328,000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	10.838.922.520	11.488.889.600	5.134.490.600	4.134.490.600	3,134,490,600
Belanja	858.334.195.790	1.149.853.332.196	1.014.290.113.246	1.076.291.765.805	1,087,619,240,263
Belanja Tidak Langsung	471.499.748.390	553.040.789.731	550.649.677.352	584.930.739.815	577,473,250,482
Belanja Pegawai	433.802.000.000	452.231.387.931	408.589.581.512	392.711.072.715	382,848,667,682
Belanja Subsidi	-	-	-	1.857.312.000	-
Belanja Hibah	2.928.000.000	3.228.000.000	19.430.100.000	33.385.000.000	13,587,800,000
Belanja Bantuan sosial	4.670.000.000	1.300.000.000	1.708.000.000	1.208.000.000	250,000,000
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	29.349.748.390	95.531.401.800	120.171.995.840	155.019.355.100	180,036,782,800
Belanja tidak terduga	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750,000,000
Belanja Langsung	386.834.447.400	596.812.542.465	463.640.435.894	491.361.025.990	510,145,989,781
Belanja Pegawai	19.229.447.400	25.675.084.900	30.611.296.690	32.087.629.600	35,432,780,950
Belanja Barang dan Jasa	176.466.000.000	219.571.336.474	257.774.898.108	270.713.642.396	292,909,193,434
Belanja Modal	191.139.000.000	351.566.121.091	175.254.241.096	188.559.753.994	181,804,015,397
SURPLUS / (DEFISIT)	-55.662.953.339	-33.619.350.904	-37.450.000.000	-35.210.000.000	8,300,000,000
Pembiayaan	55.662.460.055	33.619.350.904	37.450.000.000	35.210.000.000	8,400,000,000

Penerimaan	65.662.460.055	44.848.823.698	49.850.000.000	45.100.000.000	100,000,000
SILPA TA sebelumnya	40.000.000.000	44.098.823.698	49.750.000.000	45.000.000.000	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	25.000.000.000	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	662.460.055	750.000.000	100.000.000	100.000.000	100,000,000
Pengeluaran	10.000.000.000	11.229.472.794	12.400.000.000	9.890.000.000	8,400,000,000
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000.000.000	10.427.677.000	12.000.000.000	9.490.000.000	8,000,000,000
Pembayaran Pokok Utang	-	801.795.794	400.000.000	400.000.000	400,000,000

Sumber: DJPK Kemenkeu

Menurut Maizunati (2017) alokasi dana perimbangan tidak jarang menjadi sumber pendanaan yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah. Padahal sejatinya dengan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi potensi sumber pendanaan baru yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi Pemerintah Daerah yang mandiri secara berkelanjutan. Ketergantungan akan dana perimbangan tersebut tanpa disadari menjadikan Pemerintah Daerah menjadi institusi yang kurang inovatif dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap kondisi keuangannya dikarenakan muncul keyakinan dan rasa “aman” bahwa finansialnya akan tercukupi secara periodik. Pemantauan kondisi kesehatan keuangan kemudian menjadi hal yang kurang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah.

Sangat penting bagi pemerintah daerah selaku penyedia utama layanan publik untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah suatu daerah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya apabila kondisi keuangannya baik. Sebaliknya, dalam kondisi keuangan daerah yang buruk pemerintah daerah dapat dipastikan tidak mampu memberikan layanan publik yang baik dan memadai kepada masyarakatnya (Murmana, 2017). Oleh karena itu, di

Indonesia, kebutuhan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah daerah telah meningkat sejak desentralisasi keuangan (Ritonga, 2014).

Pada dasarnya, kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanannya secara berkelanjutan. Yaitu kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan yang ada; (2) bertahan dari terganggunya perekonomian lokal dan regional; dan (3) memenuhi tuntutan pertumbuhan alami, penurunan, dan perubahan (Suryani, 2016).

Wang dkk (2007) mendefinisikan kondisi keuangan layaknya tubuh manusia yang saling berhubungan dengan konsep multidimensi dan dimensi keuangan yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut XiaoHu (2006), kondisi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selama proses penyediaan barang dan jasa, suatu organisasi dikenai kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang. Semua kewajiban tersebut harus dibayar cepat atau lambat. Jika organisasi dapat membayar kewajiban tersebut tanpa menimbulkan banyak kesulitan keuangan, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan organisasi untuk membayar tinggi dan organisasi dalam kondisi keuangan yang baik.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Analisis Kondisi Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian di Indonesia telah dilakukan oleh Ritonga (2012) dengan judul "Menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia: suatu eksplorasi". Penelitian ini mengembangkan konsep untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah dan menerapkan konsep tersebut ke pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya, Ritonga (2014) juga melakukan penelitian dengan judul "Mengembangkan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah". Studi ini mengembangkan instrumen untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Instrumen ini akan berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk manajemen keuangan pemerintah daerah. Ritonga (2014) kembali melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari tujuh faktor yang diidentifikasi dalam literatur sebelumnya (yaitu, efisiensi keuangan, biaya layanan dan barang, populasi, dan basis pendapatan) secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan Pemda, sedangkan tiga faktor lainnya (yaitu kepadatan populasi, usia profil komunitas, dan kekayaan komunitas) tidak.

Penelitian ini dilakukan menggunakan acuan yang dilakukan oleh Ritonga (2014) mengenai Menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini adalah yang pertama dalam mengusulkan konsep untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Konsep ini terdiri dari enam dimensi, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas tingkat layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian finansial. Kemudian penelitian ini juga menggunakan acuan yang dilakukan oleh Indriyani (2017) mengenai analisis kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten subang yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah di kabupaten Enrekang.

Monitoring terhadap kesehatan keuangan secara periodik merupakan hal yang wajib dilakukan untuk membentuk suatu sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi Pemerintah Daerah terhadap berbagai kemungkinan di masa mendatang baik dari sisi ekonomi makro maupun sosial politik (Maizunati, 2017). Analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah juga perlu

dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kesehatan keuangan (*fiscal health*) pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya analisis kondisi keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Kondisi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis melakukan penelitian tentang analisis kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan LKPD yang telah diaudit oleh BPK pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Merujuk pada permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang pada Tahun Anggaran 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang pada Tahun Anggaran 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kondisi keuangan daerah dan diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk melakukan analisis kondisi keuangan daerah secara mendalam dan komprehensif lagi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini yang penulis harapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk mengetahui kondisi keuangan daerah Kabupaten Enrekang secara mendalam, serta bisa dijadikan bahan rujukan dalam membuat kebijakan selanjutnya di pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Enrekang secara komprehensif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012) yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan berbagai teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menguraikan secara ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, saran-saran bagi pihak terkait serta keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab terakhir merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, saran-saran bagi pihak terkait serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak pemerintah daerah adalah mengelolah keuangannya secara mandiri untuk memenuhi segala penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah serta dalam rangka pelayanan masyarakat. Kewajiban pemerintah daerah adalah melaporkan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Keuangan daerah bersumber dari pendapatan-pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah yaitu:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, di

mana dalam proses pemungutannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau *grants*.

- Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak (provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
- Dana Lokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Perimbangan dari Provinsi, khusus untuk daerah kota/kabupaten.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran (Dadang, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah:

Laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah adalah laporan yang menyajikan pos-pos keuangan daerah yang diperoleh dalam satu periode. Laporan keuangan wajib untuk disampaikan, tujuannya untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, berikut uraiannya:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan

Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu Aset Lancar dan Aset

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

2.1.3 Kondisi Keuangan Daerah

a. Definisi Kondisi Keuangan Daerah

Berne & Schramm (1986) mengusulkan definisi kondisi keuangan sebagai probabilitas bahwa pemerintah akan memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor, konsumen, karyawan, pembayar pajak, pemasok, konstituen, dan lainnya ketika kewajiban ini jatuh tempo. Wang et al. (2007) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai tingkat solvabilitas keuangan, yang mencakup dimensi

solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan. Groves dkk. (1981) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanannya secara berkelanjutan. Mereka membedakan solvabilitas uang tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas tingkat layanan. Solvabilitas tunai adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan cukup uang tunai selama tiga puluh atau enam puluh hari untuk memenuhi utangnya. Solvabilitas anggaran adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai tingkat layanan saat ini atau yang diinginkan. Solvabilitas jangka panjang adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kegiatan pengeluarannya termasuk pengeluaran rutin serta yang hanya akan muncul pada tahun-tahun di mana mereka harus dibayar. Selain itu, solvabilitas tingkat layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pada tingkat dan kualitas yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakatnya.

Kondisi keuangan merupakan suatu hasil usaha dari pemerintah selama menjalankan pemerintahannya setiap satu periode. Kondisi Keuangan menurut Ritonga (2014) adalah:

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat), untuk mengantisipasi kejadian tak terduga; dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

Dari berbagai definisi yang telah dikembangkan oleh para peneliti dan lembaga sebelumnya, definisi kondisi keuangan pemerintah daerah yang paling banyak diterima adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu dan kemampuan untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada dasarnya, kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanannya secara berkelanjutan. Yaitu kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan yang ada; (2) bertahan dari terganggunya perekonomian lokal dan regional; dan (3) memenuhi tuntutan pertumbuhan alami, penurunan, dan perubahan. Menurut Wang (2006), kondisi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selama proses penyediaan barang dan jasa, suatu organisasi dikenai kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang. Semua kewajiban tersebut harus dibayar cepat atau lambat. Jika organisasi dapat membayar kewajiban tersebut tanpa menimbulkan banyak kesulitan keuangan, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan organisasi untuk membayar tinggi dan organisasi dalam kondisi keuangan yang baik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada, tahan terhadap gangguan ekonomi, dan dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan dan penurunan. Intinya pemerintah daerah harus mampu memberi pelayanan yang baik dan mempertahankan pelayanan yang baik tersebut serta mampu mengembangkan daerahnya untuk kepentingan masyarakat dalam memenuhi tuntutan pertumbuhan daerah.

b. Konsep Kondisi Keuangan Daerah

Dalam mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah harus berasal dari tujuan negara karena kondisi keuangan pemerintah daerah adalah dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks Indonesia, ada empat tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Konstitusi: melindungi semua rakyat Indonesia dan seluruh negara Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat,

kehidupan intelektual bangsa, dan pembentukan tatanan dunia yang didasarkan pada kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bangsa, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, setiap pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan bangsa selama sesuai dengan rencana strategis pemerintah pusat. Akibatnya, setiap pemerintah daerah memiliki program dan kegiatannya sendiri berdasarkan persepsi masyarakatnya baik secara ekonomi maupun politik. Pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Karena setiap pemerintah daerah memiliki program dan kegiatan yang berbeda, sehingga akan berdampak pada kondisi keuangannya. Akibatnya, kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah adalah dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bangsa.

Di sisi lain, upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara dibatasi oleh ketersediaan sumber daya, termasuk manusia, keuangan, peralatan, waktu, dan sebagainya. Karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan bangsa. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua kewajibannya kepada para pemangku kepentingan harus dipenuhi. Kewajiban kepada masyarakat dapat berupa kewajiban biasa seperti pemenuhan standar layanan minimum di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur; atau kewajiban luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa seperti bencana alam, kerusuhan, dan hal-hal lain. Selain itu, pemerintah daerah harus dapat melaksanakan haknya secara efektif

dan efisien. Dengan demikian, pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah daerah yang dapat memenuhi semua kewajibannya dan dapat melaksanakan haknya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bangsa.

Membawa argumen di atas ke dalam konteks keuangan, kondisi keuangan yang baik dari pemerintah daerah terjadi ketika pemerintah daerah mampu melaksanakan hak keuangannya (yaitu mengumpulkan pendapatan) secara efisien dan efektif dan mampu memenuhi semua kewajiban keuangan kepada para pemangku kepentingannya dalam rangka untuk mencapai tujuan bangsa.

2.1.4 Analisis Kondisi Keuangan Daerah

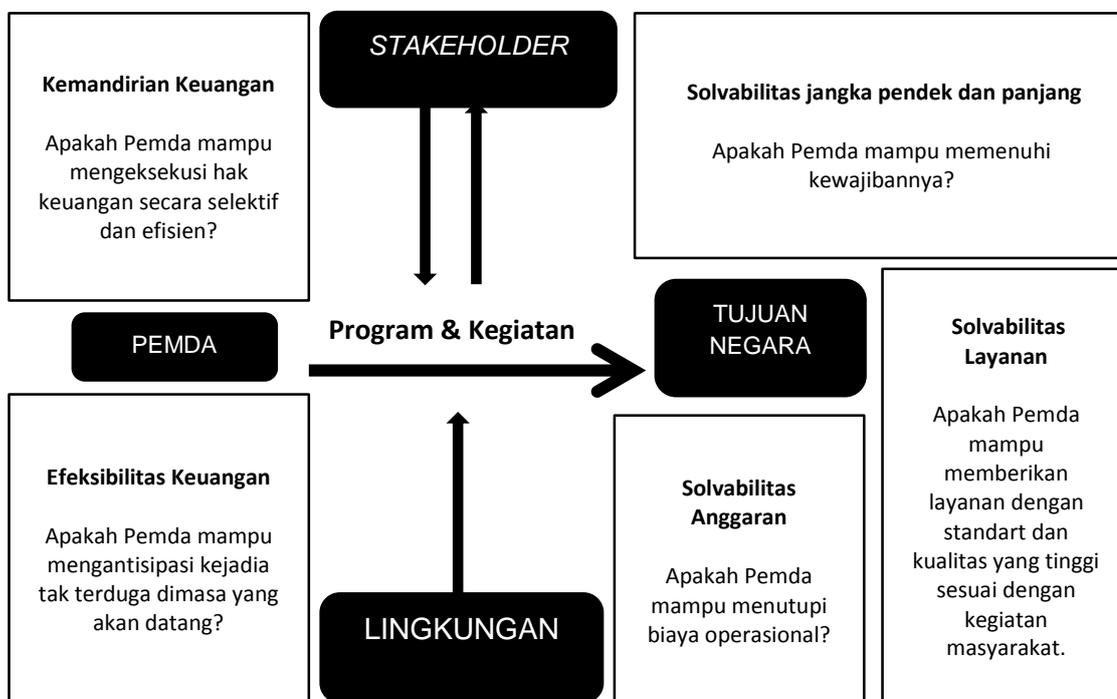
Analisis kondisi keuangan pada dasarnya tidak untuk mencari nilai baik atau buruk kondisi keuangan daerah tersebut, namun untuk menilai perkembangan keuangan daerah dari tahun-ketahun, apakah dalam tren perkembangannya menjadi lebih baik atau malah memburuk dengan membandingkan keuangan daerah dari waktu-kewaktu ataupun membandingkan keuangan daerah dengan keuangan daerah lainnya. Hasil perhitungan tersebut dilihat dari nilai trennya, trennya naik atau menurun (The Civic Federation, 2015)

Banyak peneliti yang mengembangkan model analisis kondisi keuangan. Di Indonesia sendiri belum ada model yang disepakati dalam menganalisis kondisi keuangan secara baku, padahal sangat penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui kondisi keuangan setiap daerah dalam mendukung atau sebagai acuan membuat kebijakan selanjutnya. Ritonga (2012) dalam jurnalnya mengatakan bahwa hasil dari penilaian kondisi keuangan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, untuk menentukan peringkat obligasi pemerintah daerah, dan untuk meningkat daya saing pemerintah daerah dengan daerah lainnya.

Beberapa penelitian yang membahas tentang analisis kondisi keuangan daerah antara lain Brown (1993) yang memperkenalkan 10 indikator penelitian dalam model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikenal sebagai “10-point test”. Kholah et al (2005) mengembangkan metode “10-point scale”, yaitu 9 indikator untuk menggambarkan kondisi kesehatan pemerintah daerah. Wang dan Liou (2009) menilai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan 4 dimensi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Irwan Taufiq Ritonga, karena model analisis kondisi keuangan daerah yang dikembangkan oleh Ritonga memiliki dimensi dan indikator yang lebih komprehensif. Menurut Ritonga Untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan enam dimensi sebagai berikut (Ritonga, 2014):

Gambar 2.1
Alur Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber : Ritonga (2014)

Berdasarkan argumen yang disebutkan di atas, ada enam dimensi yang membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah. Dimensi-dimensi tersebut adalah solvabilitas jangka pendek yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; solvabilitas anggaran yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional; solvabilitas jangka panjang yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang; fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan untuk mengatasi peristiwa tak terduga di masa depan; kemandirian fiskal yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak keuangan secara efektif dan efisien; dan solvabilitas tingkat layanan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

1) Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu 30 hingga 60 hari (Nollenberger dkk., 2003 dalam Ritonga 2014). Informasi keuangan dari kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, sedangkan sumber daya pemerintah daerah yang tersedia dan dimaksudkan untuk digunakan dalam satu tahun digambarkan di bagian aset lancar dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, rasio untuk mengukur solvabilitas jangka pendek dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

Rasio A = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar,

Rasio B = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang Usaha) / Kewajiban Lancar,

Rasio C = Aset Saat Ini / Kewajiban Lancar.

Rasio A adalah rasio paling konservatif dalam mengukur solvabilitas jangka pendek diikuti oleh Rasio B dan Rasio C masing-masing. Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator ini, semakin banyak aset yang ditentukan tersedia untuk menutupi kewajiban lancar. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi pula tingkat solvabilitas jangka pendeknya. Namun, nilai yang terlalu tinggi dalam rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan yang bisa lebih baik digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itu, aset lancar yang berlebihan menyebabkan penyampaian layanan yang tidak optimal kepada masyarakat.

2) Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi operasi selama periode anggaran fiskal (Nollenberger dkk., 2003 dalam Ritonga, 2014). Dengan demikian, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan operasional dan pengeluaran operasional selama periode fiskal. Kemampuan ini diukur dengan rasio-rasio berikut (rasio solvabilitas anggaran):

$$\text{Rasio A} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / (\text{Total Pengeluaran} - \text{Pengeluaran Modal}),$$

$$\text{Rasio B} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Pengeluaran Operasional},$$

$$\text{Rasio C} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Pengeluaran Karyawan},$$

$$\text{Rasio D} = \text{Total Penghasilan} / \text{Total Pengeluaran}.$$

Penghapusan pendapatan dana alokasi khusus dari total pendapatan adalah karena ini bukan pendapatan reguler dan di luar kendali pemerintah

daerah. Dalam rasio pertama, Rasio A, belanja modal dikurangkan dari total pengeluaran karena itu bukan bagian dari kegiatan operasi pemerintah daerah. Dalam kasus Rasio C, penggunaan pengeluaran karyawan sebagai penyebut adalah karena biasanya merupakan bagian terbesar dari pengeluaran operasional. Semakin tinggi rasio semakin baik adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional.

3) Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Nollenberger dkk., 2003; CICA, 1907 dalam Ritonga, 2014). Dimensi menunjukkan keberlanjutan pemerintah daerah. Kewajiban jangka panjang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah jika mereka memiliki aset yang cukup yang dibiayai dari sumber dayanya sendiri. Untuk mencerminkan solvabilitas jangka panjang, rasio yang tepat adalah menempatkan kewajiban jangka panjang sebagai pembilang dan menempatkan total aset atau ekuitas investasi sebagai penyebut. Nilai yang lebih tinggi untuk rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio semakin tinggi adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Rasio lain yang dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas jangka panjang adalah rasio ekuitas investasi terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan bagian mana dari total aset pemerintah daerah yang dibiayai oleh sumber dayanya sendiri. Nilai yang lebih tinggi dari rasio ini menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rumus untuk solvabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut:

Rasio A = Kewajiban Jangka Panjang / Total Aset,

Rasio B = Kewajiban Jangka Panjang / Ekuitas Investasi,

Rasio C = Ekuitas Investasi / Total Aset.

4) Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber keuangan untuk merespons komitmen yang meningkat atau mengatasi kejadian tak terduga dimasa depan, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas hutang. Nilai lebih tinggi dari keempat rasio ini menunjukkan tingkat pemerintah daerah yang lebih tinggi fleksibilitas untuk menghadapi kejadian luar biasa, yang bisa berasal dari sumber internal atau eksternal dari organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan nilai rasio ini menunjukkan peningkatan kualitas fleksibilitas keuangan. Dimensi fleksibilitas keuangan dapat diukur dalam rasio-rasio sebagai berikut:

Rasio A = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Pengeluaran Karyawan) / (Pelunasan Pokok Pinjaman + Pengeluaran Bunga),

Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Pengeluaran Karyawan) / Total Kewajiban,

Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Pengeluaran Karyawan) / Kewajiban Jangka Panjang,

Rasio D = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / Total Kewajiban.

Semakin tinggi nilai keempat rasio ini, semakin tinggi pula tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa yang dapat berasal dari sumber internal atau eksternal dari organisasi

pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi pula tingkat fleksibilitas keuangan.

5) Kemandirian Finansial

Kemandirian finansial adalah kondisi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber nasional maupun internasional. Semakin rendah nilai rasio ini menunjukkan semakin sedikit kemandirian keuangan dari kondisi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar nilai kedua rasionya, semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah, dengan demikian semakin besar nilai rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini diukur dengan rasio kemandirian Finansial sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \text{Total Pendapatan Sendiri} / \text{Total Pendapatan},$$

$$\text{Rasio B} = \text{Total Pendapatan Sendiri} / \text{Total Pengeluaran}.$$

6) Solvabilitas Tingkat Layanan

Solvabilitas tingkat layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang dkk., 2007 dalam Ritonga, 2014). Untuk memenuhi definisi itu, penyebut dalam dimensi ini haruslah jumlah orang yang dilayani oleh pemerintah daerah. Pembilang rasio ini adalah angka yang mencerminkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Total aset menunjukkan akumulasi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melayani masyarakat untuk masa depan. Total ekuitas juga sesuai sebagai pembilang karena itu adalah aset bersih (yaitu total aset dikurangi total kewajiban) yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melayani komunitasnya.

Dengan demikian, nilai total aset atau total ekuitas adalah angka yang sesuai untuk mewakili tujuannya. Semakin tinggi rasio total nilai aset per populasi, semakin baik pemerintah daerah menyediakan layanan publik kepada masyarakatnya.

Rasio lain untuk mengukur solvabilitas tingkat layanan adalah rasio total pengeluaran untuk populasi (Wang dkk., 2007). Rasio ini menunjukkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melayani setiap penduduk. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi inefisiensi dalam memberikan layanan yang dapat mengancam solvabilitas tingkat layanan pemerintah daerah. Rumus untuk rasio solvabilitas tingkat layanan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \text{Total Ekuitas} / \text{Jumlah Penduduk},$$

$$\text{Rasio B} = \text{Total Aset} / \text{Jumlah Penduduk},$$

$$\text{Rasio C} = \text{Total Pengeluaran} / \text{Jumlah Penduduk}.$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kondisi keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Irwan Taufiq Ritonga (2012)	Menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia: suatu eksplorasi	Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Eksplorasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik untuk dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan; kondisi keuangan yang memadai untuk solvabilitas anggaran; dan kondisi keuangan yang lemah untuk kemandirian finansial.

Nirwana (2014)	Efek Mediasi Modal Budaya Terhadap Pengaruh Modal Sumber Daya Manusia dan Modal Sumber Daya Fisik Terhadap Kondisi Keuangan Daerah Pemerintah Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Mediasi: Modal Budaya - Variabel Independen: modal sumber daya fisik dan sumber daya manusia - Variabel dependen: kondisi keuangan daerah 	Modal sumber daya manusia dan sumber daya modal fisik mempengaruhi modal budaya. Modal sumber daya manusia dan mediasi sumber daya modal fisik berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah melalui media modal budaya
Anisa Prita Dewi (2016)	Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown	Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown	skor kondisi keuangan pemerintah kota maupun kabupaten dalam setiap klasternya dari kondisi keuangan yang paling baik diantara pemerintah daerah lainnya, lebih baik daripada kebanyakan pemerintah daerah lainnya, rata-rata, lebih buruk daripada kebanyakan pemerintah daerah lainnya, hingga yang paling buruk diantara pemerintah daerah lainnya.
Suryani (2016)	Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatera Utara	Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatera Utara	(1) kabupaten/kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah / PDRB, dan rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah; dan (2) kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Aceh atas rasio belanja modal / total belanja daerah.
Agus Suwanto (2016)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Metode Klaster		Klaster pertama kriterianya "tidak sehat" dengan total 292 kabupaten dan 64 kota. Klaster ini unggul pada komponen luas wilayah dan Indeks Kemahalan Konstruksi serta dominan pada sektor pertanian dan pariwisata. Klaster kedua kriterianya "sehat" dengan anggota 39 kabupaten dan 19 kota. Berkebalikan dengan klaster pertama, klaster kedua unggul signifikan di hampir semua komponen pembentuk DAU

			dengan pengecualian luas wilayah dan Indeks Kemahalan Konstruksi.
Mozes Murmana (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2015	Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2015, peringkat tertinggi untuk masing-masing level pemerintah daerah diraih oleh Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Nur Afiah Maizunati (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali	Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang	Nilai indeks dimensi kemandirian keuangan yang rendah mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Magelang perlu untuk lebih mengoptimalkan upaya pencarian sumber dana baru dan basis pajak.
Siti lin Indriyani (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012-2016	Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Subang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan daerah Kabupaten Subang memiliki kondisi keuangan yang baik ditinjau dari dimensi solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan dan fleksibilitas keuangan. Dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang yang masih belum baik ditinjau dari dimensi solvabilitas jangka pendek, dimensi solvabilitas jangka panjang dan kemandirian keuangan.

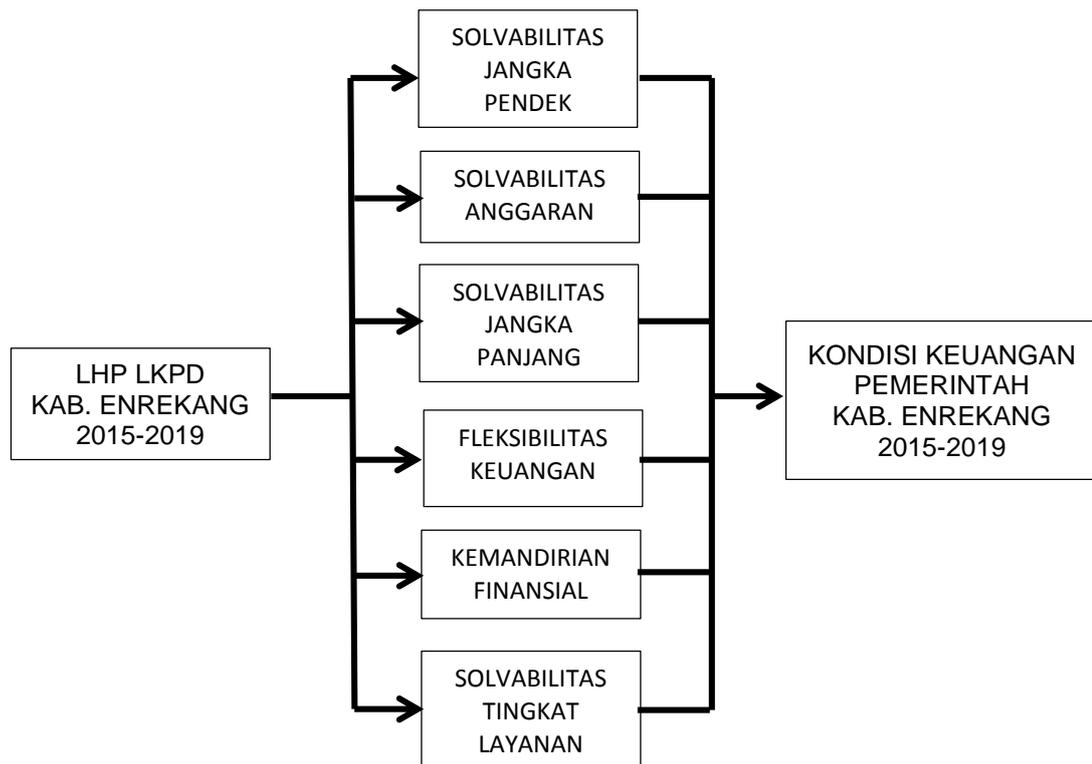
2.3 Kerangka Pemikiran

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan keuangan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien. Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang dinilai dari 6 (enam) dimensi yang dikemukakan oleh Ritonga 2014. Keenam dimensi tersebut adalah solvabilitas

jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian finansial, dan solvabilitas tingkat layanan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.2

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis